

PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
JL. KI GEDE SEBAYU NO. 4 TEGAL TELP.(0283)
TEGAL 52123

KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA TEGAL

NOMOR 50/ /2014

TENTANG

RENCANA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA TEGAL TAHUN 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal Tahun 2015, perlu menyusun Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal Tahun Anggaran 2015;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah dan Jawa Barat;

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dan Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 421);

6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 421);

6. Undang-Undang & &

6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5234);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2007 tentang Wilayah Kota Tegal dan Kabupaten Brebes dan Kecamatan Muara Sungai Kaligangsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4713);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Memberlakukan Semesta Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Tahun 1988 Nomor 4);
11. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 tentang Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 4);
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 16 Tahun 2008 tentang Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 16);
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2008 Nomor 18);
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tegal (Lembaran Daerah Kota Tegal Tahun 2013 Nomor 6);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;

- 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2009 tentang Peraturan Daerah Kota Tegal Provinsi Jawa Tengah;
- 18 Peraturan Walikota Tegal Nomor 1 Tahun 2009 tentang Produk Hukum Daerah Kota Tegal (Peraturan Walikota Tegal Nomor 1);
- 19 Peraturan Walikota Tegal Nomor 10 Tahun 2014 tentang Kerja Pemerintah Daerah Kota Tegal Tahun 2014 (Peraturan Walikota Tegal Nomor 10).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal Anggaran 2015 sebagaimana DIKTUM KESATU landasan dan pedoman bagi SKPD dalam melaksanakan Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal Tahun 2015.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal

Dikeluarkan di Tegal
pada tanggal 6 Juni 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA TEGAL

DIAH TRIASTUTI
Pembina Utama Muda
NIP19590227 198603 2 003

Tembusan :

1. Walikota Tegal;
2. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal;
3. Arsip

RENCANA
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA TEGAL
(RENJA SKPD) TAHUN 2015



PEMERINTAH KOTA TEGAL
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
TAHUN 2015

BAB PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

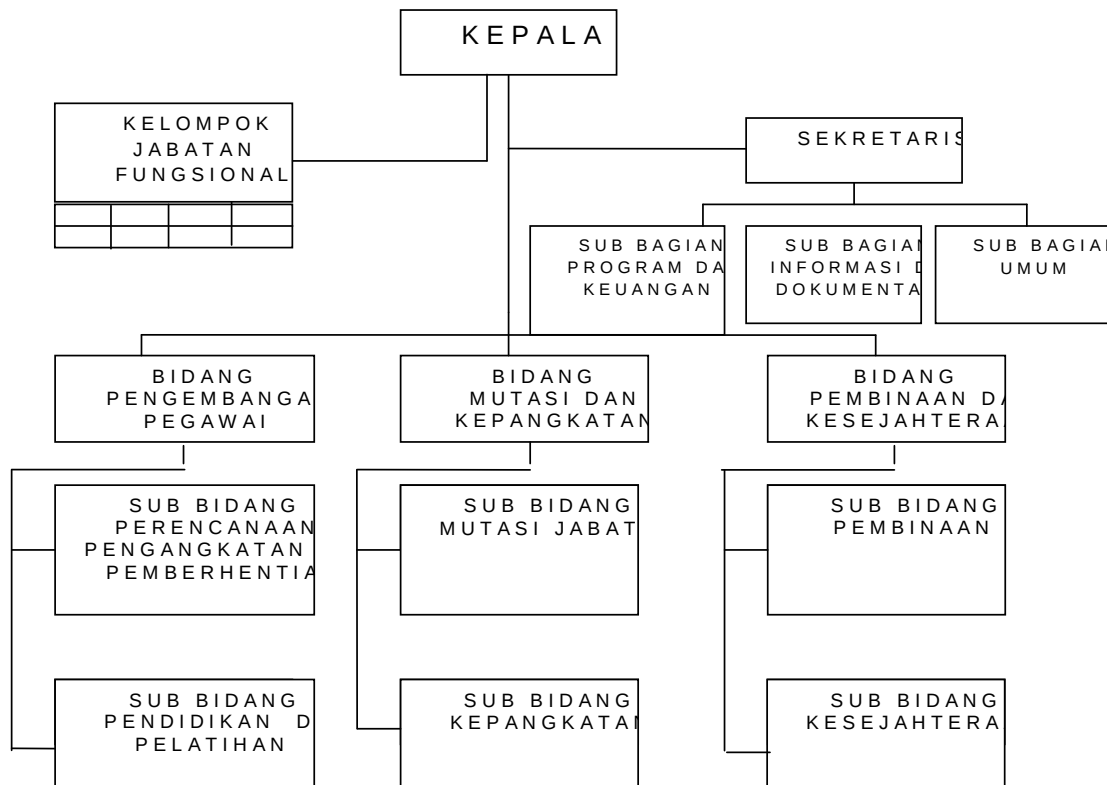
Sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Tegal, disebutkan bahwa pemerintahan daerah mengatur dan mengurus pemerintahan yang menjadi kewenangannya berdasarkan prinsip akuntabilitas dan efisiensi. Salah satu urusan pemerintahan yang ditangani oleh Pemerintah Kota Tegal adalah otonomi daerah, administrasi kepegawaian, administrasi keuangan, administrasi persandian.

Sub bidang kepegawaian sebagai salah satu unsur dari urusan pemerintahan yang wajib, dalam hal ini dilaksanakan oleh Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal yang sering dikenal dengan sebutan BKD Kota Tegal. BKD Kota Tegal ini merupakan Lembaga Teknis Daerah Kota Tegal yang berbentuk badan. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah disebutkan bahwa lembaga teknis daerah baik yang berbadan hukum maupun rumah sarak merupakan unsure pendukung tugas kepala daerah dan bertanggung jawab melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan yang bersifat spesifik.

Sebagai tindak lanjut dari Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah maka telah diterbitkan Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tegal, Badan Daerah dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal. Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas walikota yang dipimpin oleh kepala badan, berkedudukan dan bertanggung jawab kepada kepala daerah. Badan Kepegawaian Daerah bertugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan kepegawaian.

Adapun Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah dapat dilihat sebagai berikut :

**Struktur Organisasi Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal
Sesuai Perda No.12 Tahun 2008 Kota Tegal**



Profil Pegawai BKD Kota Tegal Periode Juni 2014

Jumlah : 32 PNS

Jenis kelamin : Laki-laki 20; Perempuan 12

Jenjang pendidikan S2: 3; S1/DI: 17; D3 : 5; SLTA: 3

Berdasarkan Gol. Ruang: I : 6; II : 21 ; III : 5

Berdasarkan Eselon: I.b : 1; III.a : 1 ; III.b : 3 ; IV.a : 7

Kondisi SKPD BKD Kota Tegal

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2005, S
Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal, terdiri dari :

- a. Kepala Badan (eselon II.b)
- b. Sekretaris (eselon III.a) yang membawahi 3 (tiga) sub bagian
 - Sub Bagian Program dan Keuangan (eselon IV.a);
 - Sub Bagian Informasi dan Dokumentasi (eselon IV.a);
 - Sub Bagian Umum (eselon IV.a)

- c. Bidang Pengembangan Pegawai Mib()esembawahi 2 (dua) Bidang yaitu :
 - Sub Bidang Perencanaan dan Pengangkatan (eselon IV
 - Sub Bidang Pendidikan dan Pelatihan (eselon IV.a)
- d. Bidang Mutasi dan Kepangkatan (eselon III.b), memba Bidang yaitu :
 - Sub Bidang Mutasi (eselon IV.a);
 - Sub Bidang Kepangkatan (eselon IV.a).
- e. Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan (eselon III.b), m Sub Bidang yaitu :
 - Sub Bidang Pembinaan (eselon IV.a);
 - Sub Bidang Kesejahteraan (eselon IV.a)
- f. Kelompok Jabatan Fungsional
 - Anbis kepegawaian

Tugas Pokok dan Fungsi

Berdasarkan Perda Nomor 12 tPerat2008 Walikota Tega Nomor 30 tahun 2008 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fu Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lem dan Badan Pelayanan Perizinan Terpadu Kota Tegal, diseb Kepegawaian Daerah mempunyai tugas melaksanakan p pelaksanaan kebijakan daerah di bidang kepegawaian. menyelenggarakan tugas tersebut BadanKepegawaianDaerah akan fungsi :

- a. perumusan kebijakan eknis penyelenggaraan pemerintahan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan kepegawaian;
- c. pembinaan, fasilitasi dan pelaksanaan tugas dan d abidang pengembangan pegawai, mutasi, umum kepegawaian, pengolahan data PNS lingkup Kota Tegal;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan bidang kepegawaian
- e. pelaksanaan kesekretariatan badan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang dibeaiktung Asadikro tfa usisi

Dalam melaksanakan fungsinya Badan Kepegawaian Daerah fungsi lainnya yaitu :

1. Menyiapkan penyusunan Peraturan Perundang-undangan di bidang kepegawaian sesuai dengan norma, standar atau prosedur yang ditetapkan
2. Menyiapkan kebijakan teknis pengembangan kepegawaian
3. Menyiapkan dan melaksanakan pengangkatan kenaikan pangkat pemberhentian PNS sesuai norma, standar dan prosedur yang ditetapkan
4. Memberikan pelayanan administrasi kepegawaian dalam kenaikan pangkat, pemindahan dan pensiun PNS sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan ;
5. Menyiapkan dan menetapkan pensiun PNS daerah sesuai prosedur yang telah ditetapkan ;
6. Mempersiapkan penetapan gaji, tunjangan dan kesejahteraan PNS sesuai norma, standar dan prosedur yang telah ditetapkan ;
7. Penyelenggaraan administrasi PNS Daerah ;
8. Pengolahan sistem informasi kepegawaian daerah dan terintegrasi kearsipan seluruh PNS, pemeliharaan sistem on line simpan entry data dengan perkembangan PNS, sehingga data selalu up to date mengikuti perkembangan karir, kepangkatan, dan gaji pegawai ;
9. Penyampaian informasi kepegawaian dari BKN kepada seluruh instansi di Tegal maupun dari daerah ke BKN ;
10. Penyelenggaraan peningkatan kualitas SDM daerah melalui berbagai diklat yang diperlukan ;
11. Melakukan pengawasan kedisiplinan pegawai daerah melalui inspeksi langsung ke lapangan dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran kedisiplinan.

B. Dasar Hukum

Dasar hukum Penyusunan Peraturan (Perda) Badan Kepegawaian Daerah Kota Tegal adalah sebagai berikut :

1. Undang Undang No 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;

2. Undang Undang No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 12 Tahun 2008
3. Undang-Undang No 33 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Ke
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pemba
Panjang Nasional Tahun 2005;2005
5. Peraturan Pemerintah No 38 Tahun 2007 tentang Per
Pemerintahan Antara Pemerintah, Daerah Provinsi, d
Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
6. Peraturan Pemerintah No 41 Tahun 2007 tentang Orga
Daerah;
7. Peraturan Pemerintah No 8 Tahun 2008 tentang Taha
Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan
Daerah
8. Permendagri 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan
Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mer
Nomor 59 Tahun 2007
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD)
Tengah Tahun 2005
10. Permendagri 54 Tahun 2008 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah
No 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan
Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah
11. Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal Nomor
tentang Perubahan Batas dan Luas Wilayah Kotamadya
Tegal dan Memberlakukan Semua Peraturan Daerah Ko
Tingkat II Tegal dan Wilayah Daerah Tingkat II Tegal;
12. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 4 Tahun 2008 ter
Penyusunan Perencanaan Pembangunan Daerah dan
Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Tega
13. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 5 Tahun 2008 tentang Urusan
Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Da
14. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 12 Tahun 2008 tenta
Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan
Teknis Daerah dan Badan dan Perizinan Terpadu Kota Te
15. Peraturan Daerah Kota Tegal Nomor 2008 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Tegal 2005

16 Peraturan Daerah Kota Tegay Nomor 2010 tentang Rencana
Pembangunan Mengkragah Daerah Kota-2014 2009

C. Maksud dan Tujuan

1. Maksud

Sebagai penjabaran tahunan RPJMD, Renja disusun untuk pencapaian visi, misi dan program kepala daerah dan waki

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Renja adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Badan Ke Renja BKD merupakan rencana kerja tahunan yang memuat kebijakan, program kegiatan dan pendanaan indikatif.

D. Sistematika

BAB. PENDAHULUAN

- A. Latar Belakang
- B. Dasar Hukum
- C. Maksud dan Tujuan
- D. Sistematika

BAB I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA SKPD TAHUN LALU

- A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian
- B. Analisis Kinerja Pelayanan SKPD
- C. Isu Penyelenggaraan Tupoksi SKPD
- D. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB II TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN

- A. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi
- B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD
- C. Program Kegiatan

BAB III PENUTUP

BAB I EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU

A. Evaluasi Pelaksanaan Renja Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu dan capaian renstra tercantum dalam lampiran 1 Renja lampir.

B. Analisis Kinerja Pelaksanaan

Secara umum pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Daerah telah terselenggara dengan baik. Beberapa kegiatan sangat tergantung pada kebijakan Pemerintah Pusat dan atas keputusan di tingkat Pemerintah. Analisis kinerja pelayanan SKPD pada lampiran 2 Renja

C. Isu penting Penyelenggaraan Tupoksi SKPD

Sejalan dengan perkembangan Kota Tegal sebagai pusat dan maritim maka tuntutan akan penyediaan sumber daya manusia dan kompetitif sangat mutlak diperlukan. Permasalahan sumber daya manusia tahun ke tahun cenderung mengalami peningkatan. Untuk memenuhi tuntutan ini maka Pemerintah Tegal membutuhkan PNS yang berkualitas. Berdasarkan jumlah PNS yang ada saat ini adalah 451 orang sehingga dari kuantitas dirasa belum mencukupi kebutuhan.

Banyaknya jabatan struktural yang kosong, struktural yang hanya terisi sementara, sehingga masih terdapat kekosongan jabatan. Hal ini disebabkan pembinaan dan pengembangan jabatan PNS berdasarkan pada standar kompetensi jabatan dipersyaratkan dan karir PNS yang jelas. Sehingga setiap penempatan yang kosong senantiasa mengalami kendala. Hal tersebut terjadinya rangkap jabatan yang berdampak kurang maksimal dihasilkan.

Sementara itu, upaya pengembangan kualitas sumber daya aparatur terus dilaksanakan baik melalui diklat kepemimpinan fungsional.

Para PNS yang mempunyai semangat yang tinggi untuk melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi, yang terdapat dalam Keputusan Dikti Depdiknas Nomor 12/050975/2005 tanggal 27 Februari 2007 perihal Kelas Jauh dan Kelas Singkat Surat Edaran Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor RB 4 Tahun 2013 tanggal 21 Maret 2013 Pemberian Tuntutan Belajar dari surat tersebut adalah banyaknya kendala / hambatan yang dalam proses administrasi kenaikan pangkat utamanya penyesuaian ijazah menjadi kendala mengingat belum ada pedoman yang dapat dijadikan acuan untuk memberikan keputusan izin lembaga/tempat pendidikan yang dapat ditoleransi oleh BK waktu dianggap bukan halangan. Hal ini menyebabkan banyak Pegawai yang ingin meneruskan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi tetapi karena tingkat pengurusan izin belajar menjadi semakin menumpuk dengan tugas BKD antara lain meningkatkan kualitas SDM dan sementara peraturan yang ada belum memberikan keputusan yang diperlukan keseluruhannya pemerintah pusat untuk membolehkan kelonggaran atau dispensasi bagi Pemerintah Kota Tegal untuk Perguruan Tinggi terakreditasi yang tersedia di Kota Tegal sehingga dari kota yang memiliki Perguruan Tinggi yang memadai sehingga melanggar norma / kaidah kependidikan.

Permasalahan klasik yang seringkali dihadapi di setiap instansi adalah masih kurangnya semangat kerja dan disiplin kerja. Hal ini akan berdampak pada kinerja dan prestasi kerja aparatur pemerintah itu sendiri. Diperlukan peningkatan disiplin dan kinerja aparatur secara menyeluruh. Stimulan yang diberikan seperti pemberian penghargaan kepada pemerintah/PNS yang memberikan peningkatan kinerja sangat diperlukan untuk meningkatkan semangat kerja dan prestasi. Tingkat kedisiplinan aparatur pemerintah masih tergolong rendah. Disiplin pegawai mutlak diperlukan.

Secara ringkas strategis di Badan Kepegawaian Daerah Kota

1. Belum optimalnya penyusunan formasi masing-masing SKPD
2. Belum tercukupinya PNS Pemerintah Kota Tegal sesuai yang dibutuhkan.
3. Banyaknya jabatan yang kosong, dikarenakan pembinaan dan pengembangan karir jabatan tidak sesuai pada standar kompetensi jabatan yang dipersyaratkan, dan pola, serta mekanisme yang jelek pengisian jabatan yang kosong menyebabkan terjadinya rangkap jabatan (gaping)
4. Pemerintah Kota Tegal bermaksud mengembangkan potensi memperbanyak / mempermudah prosedur izin belajar maupun namun dibatasi aturan pelarangan kelas jabatan dan per akreditasi perguruan tinggi.

D. Pembahasan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Program dan kegiatan pada Badan Kepegawaian Daerah berkaitan dengan kegiatan Forum Sarasehan (dan Renja

BAB III. TUJUAN, SASARAN PROGRAM, KEGIATAN

A. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional / Provinsi

Prioritas pembangunan Daerah 2015 tingkat Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan prioritas Badan Kepegawaian Daerah adalah Peningkatan pengelolaan pemerintahan daerah dan demokratisasi dan peningkatan kualitas wilayah, yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah 2015 Kota Tegal yaitu kelembagaan organisasi perangkat daerah dan peningkatan kesejahteraan SDM aparatur.

Adapun program dan kegiatan yang sesuai prioritas di atas sebagaimana terlampir (tabel III.A.1).

B. Tujuan dan Sasaran Renja SKPD

1. Tujuan

Tujuan yang ingin di capai oleh Badan Kepegawaian Daerah

1. Misi Meningkatkan dan mengembangkan SDM aparatur pemerintah provinsi dan meningkatkan pengetahuan dan teknologi tujuannya adalah :

- a. Peningkatan kualitas pendidikan SDM aparatur
- b. Peningkatan penguasaan teknologi dalam menunjang pelaksanaan fungsi

2. Misi Meningkatkan pemahaman aparatur pemerintah provinsi terhadap norma kepegawaian tujuannya adalah :

- a. Peningkatan kedisiplinan Pegawai Negeri Sipil
- b. Peningkatan ketaatan PNS terhadap peraturan kepegawaian

3. Misi Meningkatkan dan mengembangkan administrasi pengelolaan kepegawaian (informasi dan dokumentasi) tujuannya adalah :

- a. Peningkatan validitas database Pegawai Negeri Sipil
- b. Peningkatan mutu dan pelayanan administrasi kepegawaian

4. Misi Meningkatkan kesejahteraan aparatur pemerintah

- a. Peningkatan kualitas kehidupan Pegawai Negeri Sipil
- b. Peningkatan standar kelayakan / mutu kehidupan PNS

5. Misi Mewujudkan aparatur yang bersih dan bebas dari nepotisme / KKN tujuannya adalah :
 - a. Peningkatan pola karier Pegawai Negeri Sipil sesuai ke
 - b. Peningkatan prestasi kerja PNS
6. Misi Mewujudkan formasi sesuai kebutuhan tujuannya
 - a. Peningkatan kuantitas Pegawai Negeri Sipil sesuai keb
 - b. Peningkatan pelayanan terhadap masyarakat

2. Sasaran

Sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Daerah Kota Te antara lain :

1. a. Meningkatnya kualitas pendidikan PNS ke jenjang yang
 - b. Meningkatnya kemampuan kepemimpinan, kemampuan kemampuan fungsional
 - c. Meningkatnya pola pikir, sikap dan perilaku PNS dan pelayanan kepada masyarakat
 - d. Meningkatnya penguasaan teknologi informasi untuk kelancaran tugas dalam era global
2. a. Meningkatnya tingkat kedisiplinan PNS di seluruh aspek
 - b. Menurunnya tingkat pelanggaran PNS terhadap aturan
3. a. Meningkatnya validitas database PNS
 - b. Meningkatnya mutu dan pelayanan administrasi kepegawais (karsu dan kartu identitas pegawai)
 - c. Meningkatnya pelayanan cuti, ijin perkawinan dan perceraian
 - d. Meningkatkan pelayanan kenaikan pangkat PNS
 - e. Meningkatnya pelayanan penerbitan Ijin belajar dan tugas
4. a. Meningkatnya kualitas dan kinerja Pegawai Negeri Sipil
 - b. Meningkatnya standar kelayakan / mutu kehidupan PNS
 - c. Meningkatnya kesiapan PNS menghadapi purna tugas
 - d. Meningkatnya penghargaan terhadap pengabdian PNS
 - e. Meningkatnya mutu pelayanan administrasi pensiun
5. a. Meningkatnya karier Pegawai Negeri Sipil sesuai kompetensi
 - b. Meningkatnya prestasi kerja PNS
6. a. Meningkatnya kuantitas pegawai sesuai organisasi
 - b. Meningkatnya pelayanan terhadap masyarakat.

C. Program dan Kegiatan

Program dan Kegiatan Kepegawaian Daerah sebagaimana ter
Form 5 Renja

BAB IV. PENUTUP

Penyusunan Renja 2015 adalah sebagai pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan yang ada di Badan Kepegawaian Daerah. Renja merupakan rencana kerja tahunan yang memuat strategi, arah kegiatan dan pendanaan indikatif. Mengingat Badan Kepegawaian Daerah sebagai lembaga teknis kepegawaian maka dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya tergantung pada norma dan standar yang ditetapkan oleh Pemerintah.

Meskipun demikian, mengingat suatu organisasi harus mampu meningkatkan harapp dan tujuan ke depan yang lebih baik maka Badan Kepegawaian Daerah berorientasi pada :

1. Kemajuan Sumber Daya Aparatur sebagai pelaksana pembangunan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sebagai governance
2. Kesejahteraan aparatur pemerintah sebagai motivator kinerja ;
3. Penerapan reward and punishment terhadap setiap aparatur dengan adil.

Tegal, Juni 2014

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA TEGAL

DIAH TRIASTUTI, SH
Pembina Utama Muda (IV/c)
Nip. 195902271986032003

TABEL III.A.1
PROGRAM / KEGIATAN BKD BERDASARKAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH 2015 PROVINSI JATENG DAN KOTA TEGAL

NO.	PRIORITAS	PRIORITAS	PRPGRAM/KEGIATAN	INPUT	INDIKATOR OUTPUT		INDIKATOR OUTCOME		SKALA
				ANGGARAN (Rp. 000)	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	RUMUSAN INDIKATOR KINERJA	TARGET	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
6.	Peningkatan tata kelola pemerintahan, demokrasi dan kondusifitas wilayah	2. Peningkatan kapasitas kelembagaan organisasi perangkat daerah 3. Peningkatan kualitas dan kesejahteraan SDM aparatur	1. Program Peningkatan kapasitas Sumber Daya Aparatur a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Formal	2.446.492	Jumlah peserta diklat pimp II, III dan IV Jumlah peserta prajabatan gol. I, II, III Jumlah peserta diklat 1 pintu Jumlah peserta seleksi ujian dinas dan penyesuaian ijasah	36 org 212 org 400 org 75 org	Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS	100 %	1

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			2. Program Pendidikan Kedinasan a. Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Teknis	385.742	Jumlah peserta latsar bagi CPNS	212 org	Meningkatnya mental, sikap dan kedisiplinan CPNS	100 %	2
					Jumlah peserta bintek bendahawaran daerah	60 org	PNS yang bersertifikasi telah sesuai dengan kebutuhan masing-masing organisasi	100 %	
			3. Program Pembinaan dan Pengembangan aparatur a. Kegiatan penyusunan rencana pembinaan karir PNS	238.150	Jumlah jabatan struktural yang terisi Jumlah PNS yang naik pangkat	574 jabatan 975 org	Meningkatnya kinerja organisasi Meningkatnya motivasi kinerja dari kompetensi jenjang karir PNS	100%	3
			b. Kegiatan Seleksi penerimaan CPNS	1.045.991	Jumlah pejabat yang mengikuti seleksi PCAP Jumlah peserta yang lolos seleksi CPNS	2 batch 500 org	Menghasilkan kompetensi calon pejabat eselon II Kebutuhan PNS sesuai formasi telah terpenuhi	100 %	6

FORM I RENJA

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA SKPD
KOTA TEGAL

Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes) / Kegiatan (output)	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2013			Target dan Perkiraan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2014		
			2010	2011	2012	Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)	Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1 20	Ur-Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian										
1 20 08 03	Program peningkatan disiplin aparatur										
1 20 08 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Tertibnya pelaksanaan pelantikan - Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi camat dan lurah baru									
			8 stel	4 stel	2 stel	20 stel	11 stel	55	10 stel	10 stel	100
1 20 08 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur										
1 20 08 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan PNS - Jumlah peserta diklat pimp II, III, dan IV - Jumlah peserta prajab Go. I & II, III - Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional	4;12;10 194;161 135;223	2;3;10 141;218 192;347	4;10;13 91;85 185;312	4;10;23 15;24 178;137	4;10;23 15;24 178;137	100 100 100	3;8;13 0 400	3;8;13 0 400	100 0 100
		- Jumlah PNS tugas belajar DIV, S1 dan S2 - Jumlah PNS ijin belajar SLTP, SLTA, DIII, DIV, S1 dan S2 - Jumlah peserta seleksi ujian dinas dan penyesuaian ijazah - Beasiswa bagi PNS yang melanjutkan sekolah SLTA, D3, DIV, S1, S2	3;2;5 0;5;15;3;40; 15 28;17	1;3;4 0;4;11;8;19 0;42 39;19	0;0;1 0;9;1;3;137; 61 32;0	0 0;3;2;5;72;29 19;17	0 0;3;2;5;72;29 19;17	100 100 100	0 sesuai usulan SKPD sesuai usulan SKPD	0 sesuai usulan SKPD sesuai usulan SKPD	0 100 100
1 20 08 06	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan										
1 20 08 06 05	Penyusunan renstra SKPD	- Kelancaran pedoman penyusunan renja SKPD									
		- Renstra BKD	0	0	0	0	0	0	1 dok	1 dok	100
1 20 08 28	Program Pendidikan Kedisnasan										
1 20 08 28 01	Pendidikan dan pelatihan teknis	- Meningkatnya pengetahuan dan ketrampilan teknis PNS - Jumlah peserta kursus bahasa inggris - Jmlh peserta pelatihan komputer khusus - Diklat pengadaan barang dan jasa - Jumlah peserta bintek analisa jabatan	0 0 50 0	0 0 50 0	0 0 50 30	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 0 0	0 0 50 0	0 0 50 0	0 0 100 0

[illegible]

Tegal, 6 Juni 2014



PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN
KOTA TEGAL

Badan Kepegawaian Daerah												
No.		Indikator	SPM / standar	IKK	Target Renstra SKPD			Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan
1		2	3	4	Th 2012	Th 2013	Th 2014	Th 2012	Th 2013	Th 2014	Th 2015	Analisis
Ur Wajib Otda, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah Kepegawaian dan Persandian					5	6	7	8	9	10	11	12
Program peningkatan disiplin aparatur												
1. Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi camat dan lurah baru	-			10	20	10	2	11	10	10	
Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur												
2. Pendidikan dan pelatihan formal	- Jumlah peserta diklat pimp II, III, dan IV	-	Pejabat yang telah memenuhi persyaratan pendidikan pelatihan kepenimpinan	4:10:13	4:10:23	3:8:13	4:10:13	4:10:23	3:8:13	3:7:26		
	- Jumlah peserta prajab Go. 1 & II, III (eks honorer K-2 dan umum)	-		91,85	15,24	0	91,85	15,24	0	99,113		
	- Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional	-		185:312	178:137	400	185:312	178:137	400	400		
	- Jumlah PNS tugas belajar DIV, SI dan S2	-		0:0:1	0	0	0:0:1	0	0			
	- Jumlah PNS ijin belajar SLTP, SLTA, DIII, DIV, SI dan S2	-		sesuai usulan	sesuai usulan	sesuai usulan	0:9:1,3:13 :7,61	0:3:2,5:72 :29	sesuai usulan	sesuai usulan		
	- Jumlah peserta seleksi ujian dinas dan penyesuaian ijazah	-		32:0	19:17		32:0	19:17	75	75		
	- Beasiswa bagi PNS yang melanjutkan sekolah SLTA, D3, DIV, SI, S2	-		0	0	20:27:13; 105:52	0	0	20:27:13; 105:52	0		
Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan												
3. Penyusunan renstra SKPD	- Renstra BKD	-			0	0	1 dok	0	0	1 dok	0	
Program Pendidikan												
4. Pendidikan dan pelatihan teknis	- Jumlah peserta kursus bahasa Inggris	-			0	0	0	0	0	0	0	
	- Jmlh peserta pelatihan komputer khusus	-			0	0	0	0	0	0	0	
	- Diklat pengadaan barang dan jasa	-			50	0	50	50	0	50	0	
	- Jumlah peserta bintek analisa jabatan	-			30	0	0	30	0	0	0	

	- Jumlah peserta bintek pengelolaan barang milik daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Jumlah peserta bintek perencanaan pembangunan daerah	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	- Jumlah peserta latsar	-	-	0	39	0	0	0	39	0	0	212			
	- Jumlah peserta bintek legal drafting	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Jumlah peserta bintek penyusunan karya ilmiah bagi guru	-	-	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	- Jumlah peserta bintek sistem pengendalian intern pemerintah	-	-	30	0	0	0	30	0	0	0	0			
	- Jumlah peserta bintek penilaian prestasi kerja	-	-	0	75	0	0	0	75	0	0	0			
	- Diklat bendaharawan daerah			0	0	0	0	0	0	0	0	60			
Program pembinaan dan pengembangan aparatur															
5	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	- Jumlah jabatan struktural yang terisi Es II,a,II,b,III,a,III,b,IV,a,IV,b,V,a	-	Rasio Struktur jabatan eselonering yang terisi	1,23;41,6 1,293;132	1,23;41,6 1,293;132	1,23;41,6 1,293;132	1,19;37,5 7;215,64;	0;20;38,5 9;229;63;	1,23;41,6 1,293;132	1,23;41,6 1,293;132				
		- Jumlah PNS yang naik pangkat (struktural dan fungsional) Gol IV,II,II,I	-	PNS yang telah memenuhi persyaratan kepegawaian	975	975	975	119;518;2 31;19	878	975	975				
		- Jumlah pejabat yang mengikuti PCAP	-	2 batch	2 batch	2 batch	2 batch	1 batch	2 batch	2 batch	2 batch				
6	Seleksi penerimaan CPNS	- Jumlah peserta yang lolos seleksi dan pemberkasan CPNS (umum) Gol. I dan II ; III	-	0	0	415	0	0	415	500					
		- Jumlah peserta yang lolos seleksi dan pemberkasan CPNS (honorer) Gol. I dan II ; III	-	15;24	0	143	15;24	0	143						
7	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	- Jumlah karir/karsu/karpeg yang diterbitkan	-	Sistem informasi kepegawaian	500	500	500	400	294	500	500				
		- Jumlah PNS yang pensiun	-	150	150	150	175	154	150	150					
8	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Jumlah PNS yang dikenal hukuman disiplin	-	0	0	0	19	4	0	0					

Tegal, 6 Juni 2014

KELOMPOK KEPEGAWAIAN DAERAH
KOTA TEGAL
BINA
KEPEMERINTAHAN
DAERAH
KOTA TEGAL
NIP. 19590227 198003 2 003

FORM III RENJA

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN 2014
KOTA TEGAL
(HASIL MUSREMBANGAM)

Basan Kepegawaian Daerah

No.	Program/Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
1	2	3	4	5	6
NIHIL					

Tegal, 6 Juni 2014

KEPEMERINTAH DAERAH
KOTA TEGAL
BABAS KEPEGAWAIAN DAERAH
BUDAY
KEPEMERINTAHAN
KOTA TEGAL
BANTIKUSOTOH SH.
Regidana Utama Muda
NIP. 19590227 198603 2 003

FORM IV RENJA

PRIORITISASI KEGIATAN BERDASAR KRITERIA

No	Kegiatan	Kriteria						Total Skor	Urutan Prioritas
		Kontribusi pada Pencapaian Target Prioritas Pembangunan Daerah	SPM / IKK	Kesesuaian dengan Renja SKPD	Dukungan pada pemenuhan hak dasar rakyat lintas Kecamatan	Dukungan nilai tambah lintas Kecamatan	Status Usulan dan Urgensi		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
NIHIL									

Tegal, 6 Juni 2014

KEPALA DAERAH
DAERAH KEPENGAWAAN DAERAH
KOTA TEGAL

 **BALISTIASTUTI, SH.**
Pejabat Utama Muda
NIP. 19590227 198603 2 003

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SKPD TAHUN 2015
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2016
KOTA TEGAL

Badan Kepegawaian Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program / Kegiatan	Rencana Tahun 2015				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2016	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan dana / Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1 20	Ur-Wajib Orda, Pemerintahan Umum, Adm Keu Daerah, Perangkat Daerah								
1 20 08 01	Kepegawaian dan Persandian Program Pelayanan Adm Perkantoran								
1 20 08 01 01	Penyediaan jasa surat menyurat	- Lancarnya penyelenggaraan administrasi surat menyurat - Terkirimnya surat / paket selama 1 tahun	Kota Tegal	12 bln	3.300.000	APBD	-	12 bln	3.300.000
1 20 08 01 02	Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	- Lancarnya penyelenggaraan administrasi dan tugas-tugas kantor, kelancaran komunikasi, informasi dan pelayanan data dengan BKN - Terbayarnya rekening telepon selama 1 th, sewa VPN/IP, sewa router dan back up VPN/IP untuk program pelayanan data kepegawaian dg BKN	Kota Tegal	12 bln	39.000.000	APBD	-	12 bln	39.000.000
1 20 08 01 06	Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	- Terlaksananya Legistrasi STNK / Pergantian STNK	Kota Tegal	12 bln	3.357.000	APBD	-	12 bln	3.357.000
1 20 08 01 07	Penyediaan jasa administrasi keuangan	- Pembayaran SW jasa rahrja / PKB - Terbayarnya honorarium pengelola keuangan, jasa lembur harian PNS dan pesangon THL - Lancarnya penyelenggaraan administrasi dan kesejahteraan honorer yang memasuki usia 56 tahun	Kota Tegal	12 bln	110.595.000	APBD	-	12 bln	105.495.000
1 20 08 01 10	Penyediaan alat tulis kantor	- Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor - Tersedianya alat tulis kantor	Kota Tegal	12 bln	63.735.000	APBD	-	12 bln	63.735.000
1 20 08 01 11	Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	- Lancarnya penyelenggaraan administrasi kantor - Tersedianya blanko bahan-bahan cetakan	Kota Tegal	12 bln	81.334.000	APBD	-	12 bln	81.334.000

1	20 08 01 12	Penyediaan komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan kantor	- Lingkungan kantor terjaga penerangan dan komponen listriknya - Tersedianya komponen peralatan listrik dan elektronika sesuai dengan fungsinya	Kota Tegal	12 bin	1,699,000	APBD	-	12 bin	1,699,000
1	20 08 01 13	Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	- Lingkungan kantor terjaga kebersihannya - Tersedianya alat-alat saranaan kebersihan kantor	Kota Tegal	12 bin	4,069,000	APBD	-	12 bin	4,069,000
1	20 08 01 15	Penyediaan bahan bacaan dan peraturan per-UU-an	- Bertambahnya wawasan dan informasi bagi aparatur - Tersedianya bahan bacaan UU dan informasi dari surat kabar lokal, regional dan nasional	Kota Tegal	12 bin	2,400,000	APBD	-	12 bin	2,400,000
1	20 08 01 17	Penyediaan makanan dan minuman	- Kelancaran pelaksanaan rapat-rapat koordinasi - Tersedianya jamuan makanan dan minuman untuk rapat koordinasi	Kota Tegal	12 bin	13,950,000	APBD	-	12 bin	13,950,000
1	20 08 01 18	Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	- Kelancaran pelaksanaan koordinasi/konsultasi keluar daerah - Tercukupinya biaya perjalanan dinas untuk gol. IV, III dan II	Kota Tegal	12 bin	235,000,000	APBD	-	12 bin	235,000,000
1	20 08 02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur								
1	20 08 02 09	Pengadaan peralatan gedung kantor	- Meningkatnya kelancaran administrasi kantor - Tersedianya almari arsip 2 pintu, komputer/PC, printer, monitor, LCD proyektor dan layar LCD	Kota Tegal	9 bh	164,535,000	APBD	-	9 bh	46,500,000
1	20 08 02 24	Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	- Kelancaran pemakaian kendaraan dinas sehingga menunjang penyelenggaraan administrasi kantor - Terpeliharanya kendaraan dinas dan operasional	Kota Tegal	12 bin	39,040,000	APBD	-	12 bin	39,040,000
1	20 08 02 26	Pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor	- Aparatur merasa nyaman dengan terpeliharanya gedung kantor	Kota Tegal	12 bin	28,015,000	APBD	-	12 bin	28,015,000
1	20 08 03	Program peningkatan disiplin aparatur	- Terpeliharanya perlengkapan gedung kantor : AC, mesin tik, komputer/printer							
1	20 08 03 02	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	- Tertibnya pelaksanaan pelantikan	Kota Tegal	10 stel	17,180,000	APBD	-	10 stel	17,180,000

		- Tersedianya pakaian dinas beserta perlengkapannya bagi camat dan lurah baru					
1 20 08 05	Program peningkatan kapasitas sumber daya aparatur						
1 20 08 05 01	Pendidikan dan pelatihan formal	- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan PNS	Kota Tegal	36 org	2,446,492,000	APBD	-
		- Jumlah peserta diklat pimp II, III, dan IV		212 org			24 org
		- Jumlah peserta prajab Go. I & II, III		212 org			212 org
		- Jumlah peserta diklat teknis dan fungsional		400 org			400 org
		- Jumlah PNS jin belajar SLTP, SLTA, DII, DIV, SI dan S2	sesuai usulan				sesuai usulan
		- Jumlah peserta seleksi ujian dinas dan penyesuaian ijasah	75				75
1 20 08 28	Program Pendidikan Kedinasan						
1 20 08 28 01	Pendidikan dan pelatihan teknis	- Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan teknis PNS	Kota Tegal		385,742,000	APBD	-
		- Jumlah peserta keg latsar	212 org				212 org
		- Jmlh peserta bintek	60 org				60 org
		- bendaharawan daerah					
1 20 08 30	Program pembinaan dan pengembangan aparatur						
1 20 08 30 01	Penyusunan rencana pembinaan karir PNS	- Kenalkan pangkat PNS yang tepat waktu dan penempatan PNS sesuai dengan kompetensinya	Kota Tegal		238,150,000	APBD	-
		- Jumlah jabatan struktural yang terisi Es	2 kgt				2 kgt
		- II.a;II.b;II.a;II.b;IV.a;IV.b;V.a	975 org				975 org
		- Jumlah PNS yang naik pangkat (struktural dan fungsional) Gol IV,III;II,I	975 org				975 org
		- Jumlah pejabat yang mengikuti PCAP	2 batch				2 batch
1 20 08 30 02	Seleksi penerimaan CPNS	- Terpenuhiya kebutuhan PNS sesuai formasi	Kota Tegal		1,045,991,000	APBD	-
		- Jumlah peserta yang lolos seleksi dan pemberkasan CPNS (umum) Gol. I dan II ; III	500 org				500 org
		- Jumlah peserta yang lolos seleksi dan pemberkasan CPNS (honorer) Gol. I dan II ; III	100 org				100 org
1 20 08 30 05	Pembangunan/pengembangan sistem informasi kepegawaian daerah	- Cakupan aparatur mendapatkan karir, karsu, karpeg serta KIP	Kota Tegal		124,150,000	APBD	-
		- Jumlah karir/karsu/karpeg yang diterbitkan	500 bh				500 bh
							33,240,000

1	20 08 30 15	Monitoring, evaluasi dan pelaporan	- Prosentase PNS yang mendapat SK pensiun, cakupan aparaturnya yang terjaga kedisiplinan kerjanya, meningkatnya pengetahuan tentang aturan kepegawaian dan suksesnya pelaksanaan sumpah janji PNS - Jumlah PNS yang pensiun (BUP, pensiun dini, meninggal dunia) - Jumlah PNS yang dikenai hukuman disiplin	Kota Tegal	12 bln	222,580,000	APBD	-	12 bln	222,580,000
					78 org				78 org	
					0 kasus				0 kasus	

Tegal, 6 Juni 2014


 KEPENDAHWAAN DAERAH
 KOTA TEGAL
 NIP. 19590227 106603 2 003